

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. D., & Kiswara, E. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Apriany, F. (2013). *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Sunset Policy (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Ardani, M. N. (2010). *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Arini, D. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar*. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Sebelas Maret).
- Buyung, M. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara*. (<http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara>). (diakses tanggal 22 Maret 2016).
- Dedi, S. (2016). *Memaksakan Kepatuhan Wajib Pajak*. (<http://www.pajak.go.id/content/article/memaksakan-kepatuhan-wajib-pajak>). (diakses tanggal 22 Maret 2016).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Seri KUP – Penetapan dan Ketetapan Pajak*. Jakarta, (<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-penetapan-dan-ketetapan-pajak>). (diakses tanggal 20 Maret 2016)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Ini Bedanya Sunset Policy 2008 vs TPWP 2015*. Jakarta, (<http://www.pajak.go.id/content/article/ini-bedanya-sunset-policy-2008-vs-tpwp-2015>). (diakses tanggal 20 Maret 2016).
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Nomor: SE - 53/PJ/2015, Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Hukum Online. (2015). *Sunset Policy Jilid II Dipercaya Tambah Penerimaan Pajak*. Jakarta, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554876b631510/sunset-policy-jilid-ii-dipercaya-tambah-penerimaan-pajak>). (diakses tanggal 20 Maret 2016).

- Elisa, V. S, (2015). *Sunset Policy Jilid II Mulai Berlaku 1 Mei 2015*. Jakarta: CNN Indonesia (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428121759-7849690/sunset-policy-jilid-ii-berlaku-mulai-1-mei-2015/>). (diakses tanggal 20 Maret 2016).
- Fadli, M. N, dkk. (2014). *Seminar Perpajakan (Sunset Policy)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Gunadi. (2002). Penyidikan dan Penagihan Pajak, *Berita Pajak*, Nomor 1436/Tahun XXXIV/15 Maret 2002, hal. 18
- Hukum Online. (2015). *Sunset Policy Jilid II Dipercaya Tambah Penerimaan Pajak*. Jakarta, .(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554876b631510/sunset-policy-jilid-ii-dipercaya-tambah-penerimaan-pajak>). (diakses tanggal 20 Maret 2016).
- Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(02).
- Istichomah, F. (2013). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Setelah Sunset Policy Dan Fenomena “Kasus Pajak” (Survey Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surakarta)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Nomor: 91/PMK.03/2015, Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Miyasto. (1997). *Fungsi Mengatur dan Penegakan Law Enforcement Dalam Undang-Undang Pajak Tahun 1994*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moh. Zain. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ortax.org. (2007). *Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak*. (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=10>). (diakses tanggal 20 Maret 2016).

- Rantung, T. V., & Adi, P. H. (2009). *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 tahun 2009: Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Sekretariat Negara
- Sutanto, A. H. H., & Venusita, L. (2013). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy Pada Kpp Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*,1(3).
- Widjaya, A. G., & Ardiyanto, M. (2011). *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*. (Skripsi, Universitas Diponegoro).